



## Determinan Keikutsertaan Pekerja Sektor Informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta Tahun 2023

### *Determinants of Informal Sector Workers' Participation in BPJS Ketenagakerjaan in Surakarta in 2023*

**Delia Ayu Rahmawati<sup>1</sup>; Nurul Istiqomah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
Email: deliaayu@student.uns.ac.id; nurulistiqomah\_fe@staff.uns.ac.id

#### ABSTRACT

**Keywords:** *Labor has an important role in national development. Workers have the right to get work protection, namely BPJS Ketenagakerjaan. The Institution of Social Security employment Informal sector workers Logistic regression*

*Labor has an important role in national development. Workers have the right to get work protection, namely BPJS Ketenagakerjaan. The workforce, especially the informal sector, has increased every year, but it is not proportional to the number of BPJS Ketenagakerjaan ownership. This study aims to determine the determinants of participation of informal sector workers in BPJS Ketenagakerjaan in Surakarta in 2023. The method used in this research is descriptive quantitative using logistic regression analysis. Logit regression is used to analyze data that can help identify independent variables that affect the dependent variable. The number of samples used consisted of 100 people with purposive sampling technique. The variables observed were income, age, education, gender, marital status, number of family dependents, and risk perception. The results showed that the variables of age ( $p=0.0036$ ), gender ( $p=0.0178$ ), number of family dependents ( $p=0.0381$ ), and risk perception ( $p=0.0007$ ) affect the participation of informal sector workers in BPJS Ketenagakerjaan in Surakarta in 2023. Meanwhile, the variables of income, education, and marital status do not affect the participation of informal sector workers in BPJS Ketenagakerjaan in Surakarta in 2024. Therefore, more intensive socialization must be carried out so that the community, especially informal workers, know BPJS Ketenagakerjaan and can distinguish it from BPJS Kesehatan. It is important for relevant stakeholders such as the Dinas Koperasi dan UMKM and Perisai agents (Indonesian Social Security Activists) as an extension of BPJS Ketenagakerjaan to conduct more intensive socialization to informal workers.*

#### ABSTRAK

**Kata kunci:** *Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. BPJS Ketenagakerjaan Pekerja sektor informal Regresi logistik*

*Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja khususnya sektor informal mengalami peningkatan setiap tahun, namun tidak sebanding dengan jumlah kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi logistik. Regresi logit digunakan untuk menganalisis data yang dapat membantu mengidentifikasi variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan terdiri dari 100 orang dengan teknik pengambilan*

---

sampel berupa purposive sampling. Variabel yang diamati yaitu, pendapatan, usia, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, dan persepsi risiko. Hasil penelitian menunjukkan variabel usia ( $p=0,0036$ ), jenis kelamin ( $p=0,0178$ ), jumlah tanggungan keluarga ( $p=0,0381$ ), dan persepsi risiko ( $p=0,0007$ ) berpengaruh terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2024. Sedangkan variabel pendapatan, pendidikan, dan status perkawinan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Oleh karena itu, harus dilakukan sosialisasi yang lebih gencar supaya masyarakat, khususnya pekerja informal mengetahui BPJS Ketenagakerjaan dan dapat membedakan dengan BPJS Kesehatan. penting bagi stakeholder terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) sebagai perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi lebih gencar kepada pekerja informal.

---

## **PENDAHULUAN**

Salah satu pelaku penting dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang penting. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan ketenagakerjaan harus dikelola dengan baik dan efektif agar dapat memenuhi hak dan kewajiban tenaga kerja sebagai pelaku penting dalam pembangunan nasional (Ezah, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial secara menyeluruh dan mendorong terbentuknya sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat (Jufri & Sabar, 2021).

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terdapat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kebutuhan terhadap perlindungan tenaga kerja sangat diperlukan karena semakin tingginya risiko yang dihadapi masyarakat (Jufri & Sabar, 2021). Risiko timbul karena beberapa faktor, salah satunya adalah risiko pekerjaan. Risiko pekerjaan dapat berupa sakit, kecelakaan, hingga kematian (Muslim et al., 2022). Dalam rangka mengurangi risiko dengan mengalihkan ke pihak lain, diperlukan asuransi sebagai langkah perlindungan untuk menjamin kesejahteraan pekerja yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Jaminan perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja di Indonesia berupa jaminan sosial ekonomi termasuk kecelakaan, sakit, hari tua, dan kematian yang disebabkan oleh alat dan bahan kerja yang digunakan atau yang biasa disebut dengan keselamatan kerja (Jufri & Sabar, 2021). Berikut ini merupakan data kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan yang dibedakan berdasarkan sektor formal dan sektor informal di Indonesia:

**Tabel 1.** Kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia

Tahun	Sektor Formal (jiwa)	Sektor Informal (jiwa)
2019	20.091.447	2.225.511
2020	19.963.696	2.494.994
2021	20.838.255	3.551.858
2022	22.839.463	6.004.021

**Sumber:** Kemnaker, Peserta BPJS Ketenagakerjaan (berbagai edisi)

Berdasarkan tabel 1 diketahui rata-rata pertumbuhan pada sektor informal yaitu sebesar 41,17% dan pada tahun 2022 kepesertaan sektor informal mengalami pertumbuhan paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,04%, dimana tahun tersebut menjadi fokus utama bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan peserta sektor informal. Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan angka tersebut masih relatif kecil karena keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja informal dimana jumlah tenaga kerja sektor informal tahun 2022 sebanyak 88.249.273 jiwa atau sebanyak 64,66% dari total penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor informal dan hanya terdapat 6.004.021 peserta atau 7% yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga berasal dari beberapa faktor seperti kesulitan ekonomi untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, lebih mengutamakan kebutuhan pokok dan keperluan lain, dan kurangnya informasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan (Diana & Syarvina, 2022). Umumnya pekerja informal tidak memiliki hubungan kerja yang teratur dan upah yang tidak menentu sehingga menghambat keikutsertaan pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan (International Labour Office, 2017). Selain itu, sektor informal cenderung berpenghasilan rendah sehingga akan memperbesar risiko dan berimbas pada kesejahteraan (Pratomo, 2020).

Mengacu data dari BPS Kota Surakarta tahun 2022 jumlah pekerja sebanyak 271.928 jiwa dan 105.994 jiwa atau 38,98% bekerja pada sektor informal. Sebanyak 55.678 pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, menurut laporan tersebut artinya hanya 55.678 pekerja informal atau sekitar 52,53% yang berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Rendahnya kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta mendorong ketertarikan peneliti untuk menganalisis "Determinan Keikutsertaan Pekerja Sektor Informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta Tahun 2023".

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh pendapatan, usia, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, dan persepsi risiko terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer berasal dari jawaban kuesioner yang ditujukan kepada pekerja sektor informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan data sekunder berasal dari

data yang telah ada sebelumnya seperti data tenaga kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diakses melalui laporan tahunan yang dipublikasikan melalui website ketenagakerjaan RI, laporan tahunan keadaan angkatan kerja yang diterbitkan BPS.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kepada pekerja informal dan dokumentasi dari sumber yang ada sebelumnya . Purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dan penentuan sampel ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah minimal sampel adalah 99 orang, tetapi dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 orang. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Metode ini dianggap tepat karena variabel dependen yaitu kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan merupakan variabel dikotomi, yang berarti membutuhkan variabel dummy agar dapat langsung dimasukkan ke dalam model karena tidak memiliki nilai numerik (Wahyu & Yuliana, 2023). Selain itu pada variabel independen bersifat kontinu (interval/rasio) dan kategorikal (ordinal/nominal). Pengolahan regresi logistik dengan bantuan software Eviews 9. Perumusan model regresi logistik secara lengkap sebagai berikut:

$$Li = \ln \left( \frac{Pi}{1-Pi} \right) = \beta_0 + \beta_1 \text{Income}_i + \beta_2 \text{Age}_i + \beta_3 \text{Edu}_i + \beta_4 \text{Gender}_i + \beta_5 \text{Status}_i + \beta_6 \text{Family}_i + \beta_7 \text{Risk}_i + \mu_i$$

Dimana:

$\frac{Pi}{1-Pi}$  = Probabilitas terjadi/tidak suatu peristiwa

*Income* = Pendapatan

*Age* = Usia

*Gender* = Jenis kelamin

*Status* = Status perkawinan

*Family* = Jumlah tanggungan keluarga

*Risk* = Persepsi risiko

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang menguji variabel pendapatan, usia, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, dan persepsi risiko terhadap kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal di Surakarta berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews 9 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Karakteristik Pekerja Informal di Surakarta Tahun 2023

Variabel	Memiliki BPJSTK	Tidak memiliki BPJSTK	Jumlah
	n	n	%
<b>Pendapatan</b>			
500.000 - 1.999.999	6	20	26%
2.000.000 - 3.499.999	20	32	52%
3.500.000 - 4.999.999	7	2	9%
5.000.000 - 6.499.999	5	1	6%
6.500.000 - 7.999.999	0	2	2%
8.000.000 - 9.499.000	0	0	0%
9.500.000 - 10.999.999	0	5	5%
<b>Usia</b>			
21 - 26	0	13	13%

27 - 32	3	7	10%
33 - 38	5	6	11%
39 - 44	8	13	21%
45 - 50	12	10	22%
51 - 56	8	7	15%
57 - 62	1	5	6%
63 - 68	1	1	2%
<b>Pendidikan</b>			
SD	2	6	8%
SMP	6	11	17%
SMA	19	33	52%
D1	1	0	1%
D3	1	3	4%
S1	8	8	16%
S2	1	1	2%
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	24	42	66%
Perempuan	14	20	38%
<b>Status perkawinan</b>			
Menikah	32	51	83%
Tidak menikah	6	11	17%
<b>Jumlah Tanggungan Keluarga</b>			
0 - 1	7	27	34%
2 3	20	27	47%
4 5	10	7	17%
6 7	1	1	2%
<b>Persepsi Risiko</b>			
Sangat tidak berisiko	1	5	6%
Tidak berisiko	4	16	20%
Cukup Berisiko	9	16	25%
Berisiko	6	10	16%
Sangat berisiko	10	15	33%

**Sumber:** Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat dibedakan berdasarkan keikutsertaan pekerja informal pada BPJS Ketenagakerjaan. Terdiri dari 38% pekerja informal mengikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan dan 62% pekerja informal tidak mengikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan. Hasil perhitungan logit adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Estimasi Regresi Logistik

Variabel	Koefisien	z-Statistik	Probabilitas	Odds ratio
C	-7,3603	-3,2468	0,0012	0,0006
Pendapatan ( <i>Income</i> )	0,0455	0,2918	0,7704	1,0466
Usia ( <i>Age</i> )	0,0861	2,9139	0,0036**	1,0899
Pendidikan ( <i>Edu</i> )	0,0414	0,4479	0,6542	1,0423
Jenis Kelamin ( <i>Gender</i> )	-1,9914	-2,3699	0,0178**	0,1363
Status Perkawinan ( <i>Status</i> )	-1,4557	-1,6154	0,1062	0,2330
Jumlah Tanggungan Keluarga ( <i>Family</i> )	0,4125	2,0733	0,0381**	1,5111
Persepsi Risiko ( <i>Risk</i> )	1,1583	3,3900	0,0007**	3,1867
<i>McFadden R-squared</i>			0,250414	
<i>LR Statistic</i>			33,25821	

---

Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2023

Ket:

\*\* : Signifikan pada taraf 5%

Nilai z hitung pada variabel pendapatan adalah sebesar  $0,2918 < z$  tabel (1,65), yang berarti pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Hal tersebut dapat diperkuat dengan p value yang sebesar  $0,7704 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Lestari (2018), bahwa pendapatan bukan menjadi faktor utama dalam kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, hal ini membuktikan bahwa pendapatan yang tidak terlalu besar tidak pula mengurangi minat pekerja informal dalam mengikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, berdasarkan pemetaan terhadap responden diperoleh hasil mengenai alasan mayoritas mereka belum menjadi peserta pada BPJS Ketenagakerjaan adalah karena kurangnya akses informasi sehingga menyebabkan responden banyak yang belum mengetahui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa kepemilikan terhadap BPJS Kesehatan itu sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga anggapan responden jika sudah memiliki BPJS Kesehatan sama dengan perlindungan yang akan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa memiliki BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan kebutuhan yang utama bagi masyarakat, karena mereka masih memprioritaskan terhadap kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi, misalkan saja untuk membayar biaya pendidikan anak-anak yang harus dibayar secara rutin setiap bulannya juga (Anwar, 2017).

Nilai z hitung pada variabel usia adalah sebesar  $2,9139 > z$  tabel (1,65), artinya usia berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Hal tersebut diperkuat dengan p value yang sebesar  $0,0036 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka, variabel usia berpengaruh positif terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Nilai odds ratio pada variabel usia adalah 1,0899. Arti dari odds ratio adalah ketika usia seseorang bertambah 1 tahun maka probabilitas orang tersebut untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah 1,0899 lebih tinggi dibandingkan ketika usianya belum bertambah. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Agiza Muranda, 2021), yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia pekerja informal maka kesadaran mengenai keamanan finansial juga akan meningkat. Selain itu seiring dengan bertambahnya usia seseorang maka akan meningkatkan komitmen seseorang dalam pengambilan keputusan. Semakin tua usia seseorang, maka akan mengalami degradasi terhadap kesehatan tubuh. Tubuh mereka tidak lagi sekuat pada waktu muda, sehingga salah satu upaya untuk mengurangi resiko pada waktu bekerja adalah terdaftar sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan. Responden yang berusia 27 tahun keatas merasa sangat membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan supaya terlindungi dari adanya kecelakaan kerja karena memiliki tanggungan keluarga sehingga rasa tanggung jawab lebih besar sehingga butuh perlindungan pada waktu bekerja untuk mengurangi risiko. Berbeda dengan usia dibawah 27 tahun yang menganggap bahwa tidak perlu mengikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan karena merasa bahwa merasa tidak memiliki risiko yang besar dalam melakukan pekerjaan.

Nilai z hitung pada variabel pendidikan adalah sebesar  $0,4479 < z$  tabel (1,65), artinya variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal di Surakarta tahun 2023. Didukung dengan p value sebesar  $0,6542 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Hasil tersebut selaras dengan penelitian

(Muzhaffar et al., 2023), bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan pada BPJS. Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat yang berpendidikan rendah belum menyadari manfaat dan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan bagi pendidikan tinggi yang berkesempatan bekerja dengan gaji yang lebih tinggi mungkin akan menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan karena iuran yang ditetapkan juga semakin tinggi karena didasarkan pada besaran upah yang dimiliki serta beranggapan pula bahwa pekerjaan yang dijalani tidak berisiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi.

Berdasarkan hasil olahan data, diperoleh hasil bahwa variabel jenis kelamin berpengaruh terhadap kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal di Surakarta tahun 2023. Nilai odds ratio pada jenis kelamin adalah sebesar 0,1363. Odds ratio tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki probabilitas lebih rendah sebesar 0,1363 kali dibandingkan perempuan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau probabilitas perempuan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 7,3367 kali lebih tinggi. Hasil tersebut sesuai dengan studi yang dilakukan (Satriawan et al., 2021), yang mengemukakan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan laki-laki memiliki angka harapan hidup lebih tinggi daripada perempuan, tetapi perempuan lebih banyak mengalami masalah kesehatan lebih rentan daripada laki-laki misalkan saja jika mereka masih bekerja pada waktu hamil. Perempuan yang bekerja, selain untuk tujuan eksistensi diri juga bertujuan untuk membantu keuangan keluarga. mengingat BPJS Ketenagakerjaan terdapat santunan pelayanan kesehatan (Madya & Nurwahyuni, 2019). Perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mengikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan karena perempuan yang bekerja untuk membantu mempertahankan ekonomi keluarga, sehingga mengantisipasi risiko dengan lebih hati-hati. Selain itu, sebagian besar perempuan dalam penelitian ini yang mengikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan adalah tergabung dalam komunitas tertentu sehingga informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah diterima.

Variabel status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023 karena nilai p value yaitu  $0,1062 > 0,05$ . Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah, 2021), bahwa status perkawinan tidak berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan sehingga menganggap bahwa memiliki KIS/BPJS Kesehatan/ASKES sudah cukup dan enggan untuk mengeluarkan biaya lagi yang digunakan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan.

Variabel status perkawinan berpengaruh positif terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Nilai odds ratio adalah 1,5111 artinya bahwa ketika jumlah tanggungan bertambah 1 orang dalam keluarga maka probabilitas untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan meningkat 1,5111 kali lebih tinggi daripada yang tidak mengalami penambahan jumlah tanggungan keluarga. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurallyanda et al., 2022) karena jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi kesadaran seseorang terhadap kondisi finansial. Selain itu, jumlah tanggungan keluarga yang semakin besar mempengaruhi pemikiran responden karena keberadaan responden sebagai tulang punggung keluarga akan bekerja dengan lebih hati-hati untuk melindungi diri dari rasa aman dan nyaman bagi keluarga dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan mengcover seluruh biaya ketika terjadi kecelakaan kerja dan ketika pekerja meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapat santunan dan santunan tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan ekonomi keluarga.

Nilai z hitung pada variabel jumlah tanggungan keluarga adalah sebesar  $2,0733 > z$  tabel (1,65), artinya variabel jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif signifikan

terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Diperkuat dengan p value yaitu  $0,0381 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel status perkawinan berpengaruh positif terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Nilai odds ratio adalah 1,5111 artinya bahwa ketika jumlah tanggungan bertambah 1 orang dalam keluarga maka probabilitas untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan meningkat 1,5111 kali lebih tinggi daripada yang tidak mengalami pertambahan jumlah tanggungan keluarga. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurallyanda et al., 2022) karena jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi kesadaran seseorang terhadap kondisi finansial.

Selain itu, jumlah tanggungan keluarga yang semakin besar mempengaruhi pemikiran responden karena keberadaan responden sebagai tulang punggung keluarga akan bekerja dengan lebih hati-hati untuk melindungi diri dari rasa aman dan nyaman bagi keluarga dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan mengcover seluruh biaya ketika terjadi kecelakaan kerja dan ketika pekerja meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapat santunan dan santunan tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan ekonomi keluarga.

Variabel persepsi risiko berpengaruh terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Nilai odds ratio adalah sebesar 3,1867, menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi risiko seseorang terhadap pekerjaannya maka probabilitas untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah 3,1867 lebih besar daripada seseorang yang memiliki persepsi risiko pekerjaan yang lebih rendah. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian (Nurhayati & Lestari, 2018) bahwa semakin tinggi risiko maka sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki jaminan sosial. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2020) bahwa semakin tinggi persepsi terhadap risiko maka semakin baik orang tersebut dalam merencanakan kepemilikan asuransi jaminan sosial. Menurut data di lapangan ditemukan hasil bahwa pekerja informal memiliki persepsi risiko dari mulai tingkatan sangat tidak berisiko, tidak berisiko, cukup berisiko, berisiko, dan sangat berisiko masing-masing ada yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja informal dengan tingkatan risiko paling tinggi dalam penelitian ini adalah ojek online karena ojek online melakukan mobilitas yang sangat tinggi dan pekerjaan utamanya berada di jalan raya.

Nilai McFadden R-squared sebesar 0,250414 artinya kemampuan variabel independen (pendapatan, usia, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, dan persepsi risiko) terhadap variabel dependen (keikutsertaan pada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 25,0414% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Pada regresi logit, apabila nilai McFadden R-squared berada dalam range 0,2 - 0,4 maka sudah masuk dalam kategori yang baik (Gujarati & Porter, 2009).

## **SIMPULAN**

Temuan studi menunjukkan bahwa variabel usia, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. Berdasarkan temuan studi ini, Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pemerataan akses informasi melalui media dan lebih mengencangkan sosialisasi kepada pekerja informal dengan menggandeng berbagai pihak sehingga masyarakat dapat mengetahui perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan jaminan sosial lainnya. Selain itu, Keberadaan pekerja informal yang tersebar luas maka penting bagi stakeholder terkait seperti Dinas Koperasi

dan UMKM dan agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) untuk melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada para pekerja informal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agiza Muranda, M. (2021). Role of Demographic Factors on National Health Insurance Uptake among Informal Sector Workers in Vihiga Sub County, Vihiga County, Kenya: A Cross-Sectional Study. *Public Health Open Access*, 5(1). <https://doi.org/10.23880/phoa-16000169>
- Anwar, A. (2017). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Jawa. *Jurnal Economia*, 13(1), 79. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13323>
- Diana, & Syarvina, W. (2022). Analysis of BPJS Employment Membership for Informal Sector Workers in Medan City (Case Study of BPJS Employment, North Medan Branch). *Jurnal EMAM (Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan)*, 3(2), 479-484. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>
- Ezah, W. (2019). Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBATUAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBATUAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*.
- International Labour Office. (2017). *World Social Protection Report 2017-19*.
- Jufri, S. N., & Sabar, W. (2021). Keputusan Pekerja Informal dalam Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(2), 103-112. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/best/article/view/24125>
- Madya, S. D. O., & Nurwahyuni, A. (2019). Determinan Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Informal terhadap Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja di Indonesia: SUSENAS 2017. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, XIV(2), 110-114.
- Muslim, H. ya, Abdullah, M. F., & Aksari, F. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Formal Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 314-324. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20636>
- Muzhaffar, Z., Suci Rahmadani, & Darmawansyah. (2023). Factors Related To Bpjs Kesehatan Participation in Traders Among Traders. *Hospital Management Studies Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.24252/hmsj.v4i3.40802>
- Nurallyanda, G., Anna, Z., Rizal, A., & Suryana, A. A. H. (2022). Analisis Sosial EKonomi Asuransi Kecelakaan Kerja Nelayan Tradisional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. *Journal of Economic Perspectives*, 12(1), 66-77. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysia-n-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017.14168>
- Nurhasanah, F. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pada Perempuan di Sumatera Utara*.
- Nurhayati, I. D., & Lestari, W. (2018). Keputusan Berasuransi, Studi Demografi dan Persepsional. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 44-55.
- Pratomo, Y. S. (2020). Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja di Kota Surakarta). *Public Service and Governemnt Journal*, 1(1), 27-60.

- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). Determinants of Health Insurance Ownership in The Informal Sector Workers in Indonesia. *Tataloka*, 23(2), 263–280.
- Wibowo, D. R. (2020). Literasi Keuangan, Persepsi dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Berasuransi. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, XVII(2), 1–11.